

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat populasi pertumbuhan penduduk terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk yang besar mampu mendorong perekonomian pada sisi penawaran, serta dapat menjadi aset dan modal penting pembangunan nasional. Namun, jika jumlah penduduk yang besar tidak diatur secara efektif, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan, baik pada jangka panjang ataupun jangka pendek. Masalah-masalah ini terkait erat dengan pengelolaan pasar tenaga kerja, khususnya dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pengangguran (Marliana, 2022).

Pengangguran merupakan satu diantara permasalahan ketenagakerjaan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Jumlah individu yang menganggur atau bekerja di bawah potensinya mengalami tren peningkatan. Disisi lain, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi menyebabkan kurangnya pemanfaatan modal manusia, memberikan beban keuangan dan sosial tambahan pada rumah tangga dan masyarakat, serta berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, pengangguran yang meluas dapat memicu konflik sosial, mendorong pertumbuhan angka kejahatan, dan menghambat proses pembangunan berkelanjutan (Depnakertrans, 2004).

Isu pengangguran senantiasa menjadi topik yang relevan untuk dibahas. Pengangguran, yang juga dikenal sebagai tuna karya, merujuk pada individu yang tidak bekerja, berusaha mencari pekerjaan, atau tengah berupaya memperoleh pekerjaan yang sesuai dan layak (Sukirno, 2004). Pada dasarnya, pengangguran timbul disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan peningkatan angkatan kerja dengan ketersediaan peluang kerja relatif terbatas. Situasi ini terutama dipengaruhi oleh lambannya proses penciptaan lapangan kerja baru yang tidak mampu mengimbangi tingkat pertumbuhan tenaga kerja. Tingkat pengangguran menjadi indikator utama untuk menilai capaian perekonomian pada suatu wilayah. Angka pengangguran jika dilihat dengan seksama dapat diperoleh gambaran mengenai ada

tidaknya kesenjangan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan di suatu wilayah (Kurniawan et al., 2021).

Provinsi Jambi terletak di pesisir timur wilayah tengah Pulau Sumatera, tidak terlepas dari berbagai permasalahan salah satunya masalah pengangguran. Tabel berikut menunjukkan data tingkat pengangguran terbuka :

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Persen)**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Batanghari	4,56	4,42	4,26	3,35	3,87
Bungo	3,82	5,94	5,86	5,50	5,23
Kerinci	2,62	2,43	2,32	2,63	2,48
Kota Jambi	6,53	10,49	10,66	8,95	8,27
Kota Sungai Penuh	4,00	5,56	3,00	2,49	3,80
Merangin	4,83	4,86	4,83	4,69	4,53
Muaro Jambi	5,20	5,43	5,59	5,35	5,40
Sarolangun	4,09	5,71	5,52	5,88	5,09
Tanjab Barat	2,57	2,16	2,53	2,88	2,95
Tanjab Timur	1,63	1,41	1,56	1,32	1,67
Tebo	2,90	2,95	2,83	1,38	1,71
<b>Rata-rata</b>	<b>3,89</b>	<b>4,67</b>	<b>4,45</b>	<b>4,04</b>	<b>4,09</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas tingkat pengangguran tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi. Saat 2019, rata-rata tingkat pengangguran sebesar 3,89%. Namun, akibat perlambatan ekonomi yang dipicu oleh pandemi covid-19 tahun 2020 angka tersebut melonjak menjadi 4,67%. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran mulai menurun menjadi 4,45%, diikuti oleh penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2022 maupun 2023 dengan angka masing-masing 4,04% serta 4,09%. Selama lima tahun terakhir, Kota Jambi tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi, dengan puncaknya mencapai 10,66% pada tahun 2021. Sebaliknya, pada tahun yang sama tingkat pengangguran terendah konsisten berada pada Kabupaten Tanjab Timur, dengan angka terendah sebesar 1,32%.

Permasalahan pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jambi bersifat multidimensi, dipengaruhi berbagai variabel salah satunya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kemakmuran

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh menyeluruh. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu berdampak besar pada pembangunan. Berdasarkan Hukum Okun, pertumbuhan ekonomi yang meningkat berperan dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta berhasil menekan tingkat pengangguran. Korelasi ini terjadi disebabkan ekspansi ekonomi meningkatkan produktivitas masyarakat untuk memproduksi berbagai jasa maupun barang. Sebagai komponen dari sumber daya manusia, tenaga kerja berperan penting untuk menciptakan barang maupun jasa. Tenaga kerja bertanggung jawab dalam menjalankan proses produksi, yang selanjutnya menghasilkan kemerosotan angka pengangguran.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Persen)**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Batanghari	5,07	-0,43	4,85	12,27	3,70
Bungo	4,19	-0,48	4,99	4,73	4,66
Kerinci	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73
Kota Jambi	4,73	-4,24	4,13	5,38	6,61
Kota Sungai Penuh	5,01	-0,16	3,67	4,44	4,92
Merangin	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28
Muaro Jambi	4,79	0,35	3,96	8,05	6,28
Sarolangun	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,02
Tanjab Barat	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,51
Tanjab Timur	4,21	-0,44	0,14	0,57	2,17
Tebo	4,76	-0,03	4,29	6,29	4,50
<b>Rata-rata</b>	<b>4,59</b>	<b>-0,40</b>	<b>3,92</b>	<b>5,56</b>	<b>4,67</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Di tahun 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,59%, kemudian tahun 2020 dan 2021 menurun sebesar -0,40% dan 3,92% karena adanya pandemi Covid-19 selanjutnya tahun 2022 meningkat sebesar 5,56% selanjutnya tahun 2023 menurun sebesar 4,67%.

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengangguran dimana banyaknya jumlah penduduk miskin sering kali berbanding lurus dengan peningkatan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran umumnya digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian pembangunan. Kemiskinan tidak lagi hanya didefinisikan oleh kekurangan materi sebaliknya, kemiskinan juga dicirikan oleh sejauh mana individu, rumah tangga, atau masyarakat memiliki akses terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan publik penting lainnya (Amir, 2007).

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Jiwa)**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Batanghari	26,53	26,54	27,24	26,24	25,88
Bungo	20,87	22,07	23,64	20,69	20,65
Kerinci	17,00	17,48	18,45	18,20	18,21
Kota Jambi	48,95	50,44	54,23	50,40	50,09
Kota Sungai Penuh	2,55	2,78	3,03	2,64	2,66
Merangin	32,88	33,92	35,44	34,14	35,19
Muaro Jambi	16,86	17,30	20,49	20,64	20,83
Sarolangun	25,39	25,79	27,06	26,23	26,77
Tanjab Barat	35,12	34,78	36,10	33,95	33,61
Tanjab Timur	25,35	24,23	24,42	23,42	23,33
Tebo	22,83	22,47	23,77	22,81	23,47
<b>Rata-rata</b>	<b>25,64</b>	<b>26,00</b>	<b>25,61</b>	<b>23,42</b>	<b>25,52</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Sesuai jumlah penduduk miskin dalam tabel diatas selama periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 memiliki rata-rata sebesar 25,64%, kemudian meningkat tahun 2020 menjadi 26,00%. Selanjutnya tahun 2021 terjadi rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 25,61%, dan penurunan signifikan tahun 2022 dengan rata-rata sebesar 23,42%. Namun, rata-rata jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 25,52%.

Variabel selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengangguran disebabkan oleh belanja modal. Belanja modal mengacu bagi penggunaan dana yang diperuntukkan untuk mendapatkan aset tetap serta sumber daya jangka panjang dengan manfaat yang berlangsung dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan guna memperkuat infrastruktur serta mengembangkan aset (Handayani et al., 2017). Sebagai kategori belanja pemerintah langsung, belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan sumber daya daerah sekaligus merangsang perekonomian masyarakat (Rahmadi et al., 2022). Peningkatan belanja berpotensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun regional. Seiring dengan meluasnya kegiatan ekonomi, permintaan tenaga kerja tentunya akan meningkat, yang berujung pada terciptanya lebih banyak peluang kerja. Permintaan akan sumber daya manusia yang muncul akibat aktivitas ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan pekerja, dan pada gilirannya berkontribusi pada penurunan angka pengangguran (Irawan dan Suparmoko, 2017).

**Tabel 1.4 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019- 2023 (Miliar)**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Batanghari	251,12	150,46	177,30	276,39	460,63
Bungo	234,62	153,99	103,30	115,34	171,43
Kerinci	293,81	216,76	165,03	158,55	151,35
Kota Jambi	432,10	444,35	742,65	375,46	560,80
Kota Sungai Penuh	176,54	134,64	168,82	140,13	126,96
Merangin	226,72	274,68	342,89	73,71	172,13
Muaro Jambi	322,19	262,78	268,24	245,15	261,59
Sarolangun	414,97	247,73	158,70	184,69	179,42
Tanjab Barat	697,23	353,97	404,37	474,29	490,38
Tanjab Timur	328,87	229,23	229,95	290,56	314,98
Tebo	269,09	139,86	221,21	387,53	223,96
<b>Rata-rata</b>	<b>331,57</b>	<b>237,13</b>	<b>271,17</b>	<b>247,44</b>	<b>283,06</b>

Sumber : DJPK Provinsi Jambi, 2023

Sesuai data belanja modal pada tabel 1.4 selama periode 2019–2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Untuk tahun 2019, rata-rata belanja modal mencapai Rp.331,57 miliar, menurun di tahun 2020 menjadi Rp.237,13 miliar, dilanjutkan dengan penurunan berikutnya. Peningkatan rata-rata belanja modal kembali terjadi tahun 2022 mencapai Rp.271,17 miliar, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp.247,44 miliar. Sementara itu, tahun 2023 belanja modal kembali meningkat dengan rata-rata mencapai Rp.283,06 miliar.

Selain belanja modal, tingkat partisipasi angkatan kerja atau dikenal dengan TPAK berkaitan juga dengan pengangguran. TPAK adalah salah satu parameter ketenagakerjaan yang menunjukkan porsi angkatan kerja aktif mengikuti kegiatan ekonomi pada jangka waktu yang berkelanjutan (Rambe et al., 2019). Ketidakseimbangan terhadap kuantitas angkatan kerja serta pembukaan kesempatan kerja dapat menimbulkan permasalahan kependudukan serta peningkatan jumlah pengangguran pada suatu daerah (BPS, 2022).

**Tabel 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Persen)**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Batanghari	60,35	67,02	68,81	63,42	62,01
Bungo	63,78	64,89	63,58	67,83	70,30
Kerinci	66,26	69,55	70,90	73,53	71,89
Kota Jambi	66,30	64,12	63,12	64,52	64,85
Kota Sungai Penuh	63,18	65,99	64,92	63,02	68,24
Merangin	68,91	70,17	69,85	69,50	71,17
Muaro Jambi	59,16	61,63	62,78	67,21	74,38
Sarolangun	65,20	68,58	64,86	66,74	66,52
Tanjab Barat	70,42	74,83	73,89	70,00	70,17
Tanjab Timur	69,84	74,18	71,22	72,85	67,56
Tebo	70,17	71,13	70,65	69,02	70,13
<b>Rata-rata</b>	<b>65,78</b>	<b>68,37</b>	<b>67,69</b>	<b>67,97</b>	<b>68,84</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Sebagaimana disajikan dalam tabel 1.5 TPAK tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2019, TPAK mencapai rata-rata 65,78%, kemudian

mengalami peningkatan tahun 2020 sebesar 68,37%. Namun, tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 67,69%. Selanjutnya, TPAK kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 67,97%, dan puncaknya mencapai 68,84% pada tahun 2023.

Penelitian sebelumnya yang membahas terkait hal tersebut, salah satunya penelitian (Citra & Yulmardi, 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara signifikan mempengaruhi pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, penelitian (Rambe et al., 2019) menunjukkan tidak adanya pengaruh dari TPAK terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya penelitian (Fahira et al., 2023) dengan hasil belanja modal secara signifikan berdampak positif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengidentifikasi perlunya dilakukan kajian yang komprehensif mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka melalui variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, belanja modal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Oleh sebab itu peneliti mengadakan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, Belanja Modal dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar pemaparan tersebut, persoalan yang bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, belanja modal, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, belanja modal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2019-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Upaya penelitian ini diarahkan guna menganalisis dan mengatasi persoalan yang telah diidentifikasi, yakni :

1. Menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, belanja modal, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2019-2023.
2. Menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, belanja modal, dan partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun signifikansi dari studi ini guna memberikan wawasan dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan keilmuan, yakni :

#### **1. Manfaat Akademis**

Diupayakan menjadi bahan kajian dan sumber pengetahuan bagi keperluan riset selanjutnya berkaitan pada permasalahan pengangguran terbuka di tingkat regional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktisi mampu dijadikan sebagai acuan ataupun pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang lebih efektif berkaitan dengan pengangguran.